



Komite Pemangku Kepentingan (SAC) tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Keberlanjutan (SFMP 2.0) APRIL

– Rapat ke-10 di Pangkalan Kerinci, Riau - Indonesia, 23-25 Mei 2017 –

Catatan tentang Pilihan-Pilihan Hutan Tanaman Rakyat/ Hutan Rakyat

1. Apa, Siapa?

SAC setuju bahwa HTR/HR pada umumnya merupakan area yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut, baik untuk pasokan kayu maupun alasan-alasan pengembangan masyarakat lainnya. Perlu dicatat bahwa istilah ini sangat luas dan sering kali memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, maka akan lebih baik jika menggunakan istilah yang lebih spesifik, seperti “hutan tanaman skala kecil atau hutan tanaman masyarakat” untuk tanaman akasia. Pilihan-pilihan yang dikembangkan harus menarik bagi semua kelompok (masyarakat tradisional, desa, koperasi) atau petani perorangan. .

2. Kerangka

Diskusi tersebut mengidentifikasi beberapa potensi masalah antara:

- Kepatuhan terhadap SFMP2.0
- Peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang belum difinalisasi
- Persyaratan-persyaratan untuk sertifikasi.

SAC berharap bahwa HTR/HR ini sebagian besar akan berada di lahan yang sebelumnya telah terbuka. . Namun, jika sebuah proposal hutan HTR/HR misalnya menimbulkan isu HCV/HCS, maka untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan maka perlu dipertimbangkan ketentuan khusus. .

SAC menyarankan untuk fokus pada prinsip-prinsip di SFMP 2.0, meskipun hal itu mengarah pada beberapa kualifikasi dan amandemen kecil (mungkin menjadi SFMP 2.1) pada waktunya. Regulasi-regulasi dan arahan pemerintah terkait HTR/HR dan/atau hutan tanaman berskala kecil masih akan terus berkembang dan dapat terus berevolusi selama beberapa tahun ke depan, maka terdapat kemungkinan besar perusahaan dapat berkontribusi secara konstruktif dengan menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan. Fokus pada perancangan perjanjian kesepakatan dengan ketentuan sertifikasi yang ada dapat menciptakan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan karena persyaratan ini kemungkinan akan segera berubah, dan juga karena jumlah pengiriman kayu mungkin tidak material (misalnya hanya beberapa % dari total asupan kayu) atau dapat diperlakukan sebagai “controlled wood” misalnya. Jika sebuah hutan tanaman industri disewa dari masyarakat atau perorangan, maka pengelolalah, dan bukan pemilik tanah, yang harus mengupayakan sertifikasi.

3. Konten

SAC menyarankan untuk mengembangkan pilihan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus/ pilihan , baik itu hanya sewa lahan, atau paket agro-kehutanan, termasuk dukungan untuk produksi pertanian yang sesuai, namun keduanya memiliki kewajiban kontraktual, dimana kayu yang dihasilkan akan menjadi milik perusahaan.



STAKEHOLDER
ADVISORY
COMMITTEE

SAC mendukung gagasan: pembedaan pembayaran yang bergantung pada jarak dari pabrik; premium untuk hasil di atas rata-rata; melanjutkan program pengembangan masyarakat; dan pembayaran tahunan dengan ketentuan pembayaran uang muka dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Ada kemungkinan untuk memperluas pengaturan kooperatif serupa dengan kelompok masyarakat atau pemilik lahan di masa depan untuk NTFP.

4. Dimana

SAC menyarankan untuk mendekati orang-orang yang menempati lahan yang relative tidak produktif di dalam area konsesi (atas izin KLHK) dan kelompok masyarakat dengan lahan potensial di luar konsesi, hingga yang sejauh 200km. Disarankan juga untuk mendiskusikan pilihan-pilihan dengan para pemangku kepentingan, untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang jenis kerjasama, dan alasan perusahaan untuk mendukung hutan tanaman berskala kecil. HTR/HR merupakan kegiatan yang berupaya untuk mengembangkan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kuantitas dan keragaman pasokan kayu ke pabrik Kerinci.